



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya

Mojokerto, Januari 2026



CAMAT JETIS

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.MM

Pembina TK./IVb

NIP. 196810161990031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	92,50	92,53	100.03%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,11	100,75%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	95,15%	100,16%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,7 (Tinggi)	85,72 (Tinggi)	98,87%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,50	92,53	100,03%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,50	82,11	100,75%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 2.499.596.269 atau 95,15% dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.626.967.000

Capaian kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum	2
I.3 Isu-isu Strategis.....	4
I.3.1 Kondisi Internal.....	5
I.3.2 Kondisi Eksternal.....	5
I.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 8
II.1 Penjenjangan Strategis.....	8
II.2 Indikator Kinerja Utama	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 21
III.1 Pengukuran Kinerja	21
III.2 Analisis Kinerja.....	23
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya.....	31
III.4 Akuntabilitas Anggaran.....	32
 BAB IV PENUTUP	 34
 LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I.1 Matriks Penjenjangan Strategis	9
Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama	15
Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	18
Tabel II.3.B Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)	19
Tabel II.4 Anggaran Per Program	Error! Bookmark not defined.
Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	21
Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	22
Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)	26
Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten	32
Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025	32
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	33

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Kecamatan Jetis	2
Gambar I.2. Struktur Organisasi Kecamatan Jetis.....	4
Gambar II Grafik Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Jetis	31

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses pembuatan laporan kinerja diawali dengan penyusunan perencanaan kinerja sebagai dasar pengukuran capaian. Tahapan ini meliputi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2. Penetapan Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja
3. Penyusunan rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran

Penyampaian LKjIP Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Jetis dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

I.2 Gambaran Umum

Tugas Kecamatan membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan

Kecamatan Jetis berada pada bagian Utara Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Di Jetis sekarang banyak berdiri Kawasan industri baru seperti di desa Pening dan Mlirip. Perusahaan produsen bumbu masak terbesar di Indonesia salah satu pabriknya terdapat di desa Mlirip. Wilayah Kecamatan Jetis terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Jetis sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Jetis
- Sebelah Timur : Kec. Wringin Anom Kab. Gresik
- Sebelah Selatan : Kota Mojokerto
- Sebelah Barat : Kec. Gedeg dan Kec. Kemlagi

PETA WILAYAH KECAMATAN JETIS



Gambar I.1 Peta Kecamatan Jetis

Secara administratif Kecamatan Jetis terdiri dari 16 Desa , 29 Dusun , 79 RT serta jumlah penduduk sebesar 89.104 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto perJuni 2025) dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mlirip	3719	3713	7432
2	Penompo	3812	3531	7343
3	Canggu	5498	5361	10859
4	Ngabar	3233	3080	6313
5	Banjarsari	2672	2563	5235
6	Sawo	1777	1770	3547
7	Mojorejo	1983	1965	3948
8	Jolotundo	2847	2751	5598
9	Kupang	2691	2588	5279
10	Bendung	2543	2399	4942
11	Mojolebak	2648	2624	5272
12	Parengan	1834	1886	3720
13	Jetis	3668	3547	7215
14	Perning	2095	2089	4184
15	Sidorejo	2176	2173	4349
16	Lakardowo	1987	1881	3868
TOTAL		45183	43921	89104

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

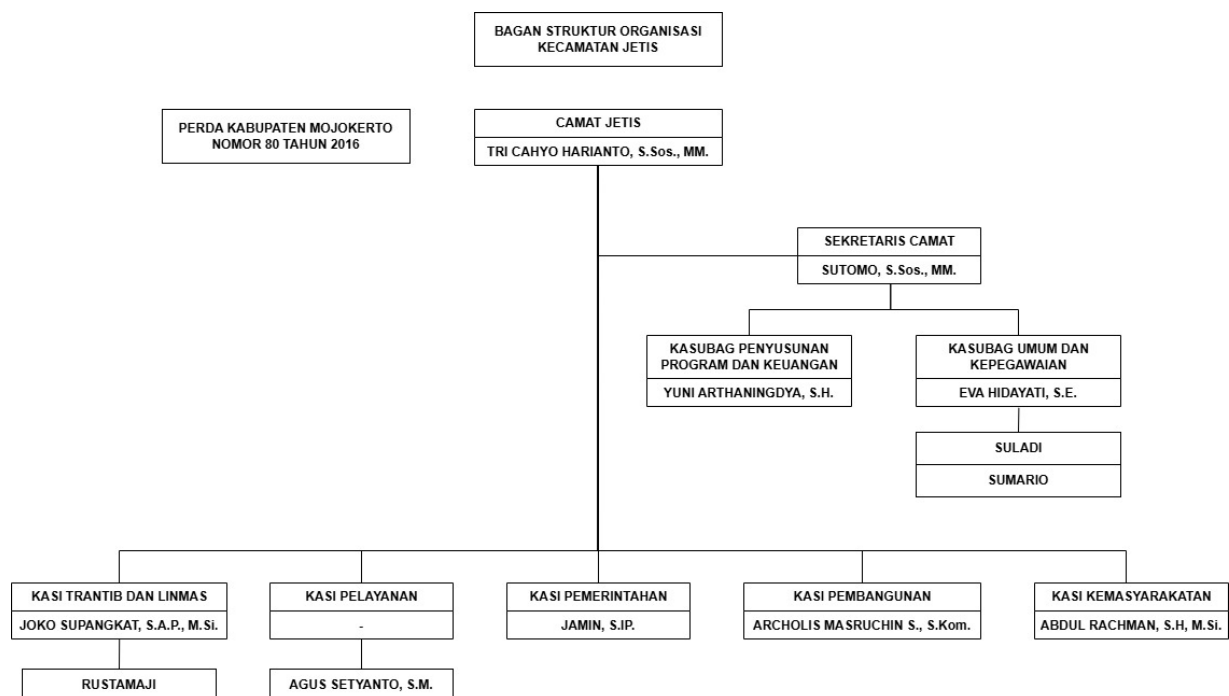
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat, pelaksanaan koordinasi kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, Kecamatan juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan, pengoordinasian kegiatan perangkat daerah di wilayah kecamatan, fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar II.2. Struktur Organisasi Kecamatan Jetis

I.3 Isu-isu Strategis

Kecamatan Jetis sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis, karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Jetis diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

I.3.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Jetis.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jetis;
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi;
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan;
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai;
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang mencukupi;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi

I.3.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena

berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Jetis dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi wilayah Kecamatan Jetis yang subur sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan lainnya;
2. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
3. Tingginya peluang pasar;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
5. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan;
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
4. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan;
7. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupa bumi;
8. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa;

9. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan;
10. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Kecamatan Jetis Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai- nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama “membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”, mendukung pencapaian misi ke-3:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1 A Matriks Penjenjangan Strategis (Sesuai dengan Dokumen perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal						
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal				IKM Kecamatan	92,5
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100,00%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,15 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	3 Paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	11 Unit

			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100,00%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mendukung pencapaian misi ke-1:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel III.1 B Matriks Penjenjangan Strategis (Sesuai dengan Dokumen perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
	Meningkatnya Kinerja Layanan Masyarakat			IKM Kecamatan	92,5
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai target	100,00%

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,15 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	3 Paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	11 Unit
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100,00%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 laporan
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Fasilitasi

				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Jetis memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :

Tabel III.2 A Indikator Kinerja Utama (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	Indeks	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		Persen	Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan ----- 100% keseluruhan Jumlah Pelayanan	Laporan Hasil Pelayanan
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		Persen	Jumlah koordinasi yang ditndaklanjuti -----x 100% keseluruhan Jumlah Koordinasi	Laporan Hasil Koordinasi
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. ket Nlai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		3.2	Persentase Realisasi Anggran Perangkat Daerah	persen	Jumlah Realisasi Anggaran - ----- x 100% Jumlah Pagu Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	IP ASN Kecamatan Ket: Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		laporan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Inovasi Kecamatan

Tabel II.2.B Indikator Kinerja Utama (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. ket Nlai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE SAKIP dari Menteri PAN dan RB
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persen	Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan ----- x 100% keseluruhan Jumlah Pelayanan	Laporan Hasil Pelayanan

4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{keseluruhan Jumlah Koordinasi}} \times 100\%$	Laporan Hasil Koordinasi
----	---	--	--------	---	--------------------------

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	92,50

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil oordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggran Perangkat Daerah	95,00%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,7 (Tinggi)
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran sesuai Dokumen Perencanaan 2021-2025, sebagai berikut :

Tabel II.3.B Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.425.974.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 16.975.500	APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.183.024.500	APBD 2025

Tabel II.3.C Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,50
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	81,5
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran per program sebagai berikut:

Tabel II.3.D Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.193.843.650	P APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 16.975.500	P APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.416.147.850	P APBD 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Jetis tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	92,50	92,53	100,03 %

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%

2.	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	82,11 (A)	100,75%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,00%	95,15 %	100,12 %
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,7 (Tinggi)	85,72 (Tinggi)	98,87%
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,5	-	89,31	-	93,40	92,53	100,03%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	81,5	-	-	82,11	-	82,11	100,75

	Kinerja Perangkat Daerah								%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	17%	28%	27%	28%	100%	100%
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25%	-	35%	40%	100%	100%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Kecamatan Jetis memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja.

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu : “Terwujudnya pelayanan Publik yang Optimal” sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu “IKM Kecamatan”, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan formulasi perhitungannya :

Total dari Nilai Persepsi per Unsur

----- x Nilai Penimbang

Total Unsur yang Terisi

Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan formulasi perhitungannya :

Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

----- x 100%

Jumlah pelayanan yang terlayani

Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Persentase hasil oordinasi yang ditindaklanjuti dengan formulasi perhitungannya :

Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

----- x 100%

Jumlah dokumen hasil koordinasi

Kinerja lainnya Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel memiliki 3 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu :

1. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari LHE SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP, adapun kategori nilai :

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30

Kategori Kurang : 30 – 50

Kategori CC Cukup : 50 – 60

Kategori B Baik : 60 -70

Kategori BB Sangat Baik : 70 – 80

Kategori A Memuaskan : 80 - 91

Kategori AA Sangat Memuaskan : 90 – 100

2. Indikator Persentase Realisasi Anggaran perangkat daerah, dengan formulasi perhitungannya :

Jumlah Realisasi Anggaran

----- x 100%

Jumlah Pagu Anggaran

3. Indikator Indeks Profesionalitas ASN, nilai Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari hasil Evaluasi BKPSDM, adapun kategori nilai IP ASN :

Kategori Sangat Rendah : =< 60

Kategori Rendah : 61 – 70

Kategori Sedang : 71 – 80

Kategori Tinggi : 81 – 90

Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100

Kinerja Lainnya “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya yaitu Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan formulasi perhitungannya adalah : ***Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan***

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jetis ada 4 Sasaran Strategis, sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan” Sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu “IKM Kecamatan”, dengan formulasi perhitungannya :

Total dari Nilai Persepsi per Unsur

----- ***x Nilai Penimbang***

Total Unsur yang Terisi

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu “Nilai SAKIP Kecamatan Jetis” adapun nilai SAKIP tersebut diperoleh dari LHE SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP, adapun kategori nilai :

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30

Kategori Kurang : 30 – 50

Kategori CC Cukup : 50 – 60

Kategori B Baik : 60 -70

Kategori BB Sangat Baik : 70 – 80

Kategori A Memuaskan : 80 - 91

Kategori AA Sangat Memuaskan : 90 – 100

Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan) memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar” dengan formulasi perhitungan :

Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

----- ***x 100%***

Jumlah pelayanan yang terlayani

Sasaran Strategis keempat yaitu Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” dengan formulasi perhitungan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

----- x 100%

Jumlah dokumen hasil koordinasi

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.A Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	86.40	86,44	88,53	92,26	92,53	92.50	100.03 %

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
				2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif,	3.1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	76,10 (BB)	79,90 (BB)	80.08 (A)	81,05 (A)	82,11 (A)	80,68	101.77%

	Efisien dan Akuntabel	3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95 %	95,84 %	97,43 %	93,48 %	95,15%	94%	101,22%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	NA	47,53 (Sangat Rendah)	78 (Sedang)	86,66 (Tinggi)	85,72 (Tinggi)	72 (Sedang)	119,25%
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		NA	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Tabel III . 2.B Perbandingan Realisasi Kinerja Per Program Tahun 2021 s/d 2025

NO.	Sasaran Program	Indikator program	Target	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (A)	76,10 (BB)	79,90 (BB)	80,08 (A)	81,05 (A)	82,11 (A)	80,68	101.77 %
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	0 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III.2.c Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 s/d 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		Capaian 2025	Target Akhir Renstra	Progres Capaian Renstra
				2024	2025			
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,5	92,26	92,53	100.03 %	85	108,85 %
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81.5 (A)	81,05 (A)	82,11 (A)	100,75 %	80,68 (A)	101,77 %
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Sasaran Program	Indikator program	Target 2025	Realisasi		Capaian 2025	Target Akhir Renstra	Progres Capaian Renstra
				2024	2025			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	85	NA	90	105,88%	87,5	102,86%
		Persentase Realisasi Anggaran	95%	93,48 %	95,15%	99,07%	95 %	99,49%
2	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator “IKM Kecamatan” di tahun 2025 sebesar 100.03 % Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 92,50 dan realisasi sebesar 92,53 Capaian Indikator Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan tercapai 100%, Capaian indicator Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100%, capaian indicator Persentase Realisasi Anggran Perangkat Daerah 100,12%, Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 98.87% dan capaian

indicator Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebesar 100%.

Capaian Indikator kinerja “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” sebesar 100% angka tersebut dicapai dari target 100% dan terealisasi 100%, untuk indikator kinerja “Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti” tercapai 100% dari target 100%, Capaian indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” terealisasi sebesar 100,12% capaian tersebut diperoleh dari target 95 % tercapai 95,15%, Capaian Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sebesar 98,87% capaian tersebut diperoleh dari nilai IP ASN sebesar 85,72 dari target 86,70 dan untuk capaian kinerja “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan” sebesar 100% atau 2 Inovasi.

Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu :

- Komitmen dari semua karyawan / karyawan;
- Adanya pembinaan staf;
- Mendorong untuk selalu ikut webinar ataupun pelatihan/diklat yang diadakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- Peninjauan Kembali mengenai persyaratan maupun publikasi persyaratan;
- Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan tupoksi.

Berdasarkan tabel III.2 perbandingan realisasi kinerja, realisasi Kecamatan Jetis terus mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, progres capaian Kecamatan Jetis telah mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Kecamatan Jetis. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Kecamatan Jetis juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

1. penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
2. penghapusan mamin rapat internal;
3. sentralisasi anggaran perjalanan dinas.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta alternatif solusi yang dilakukan per Indikator Kinerja :

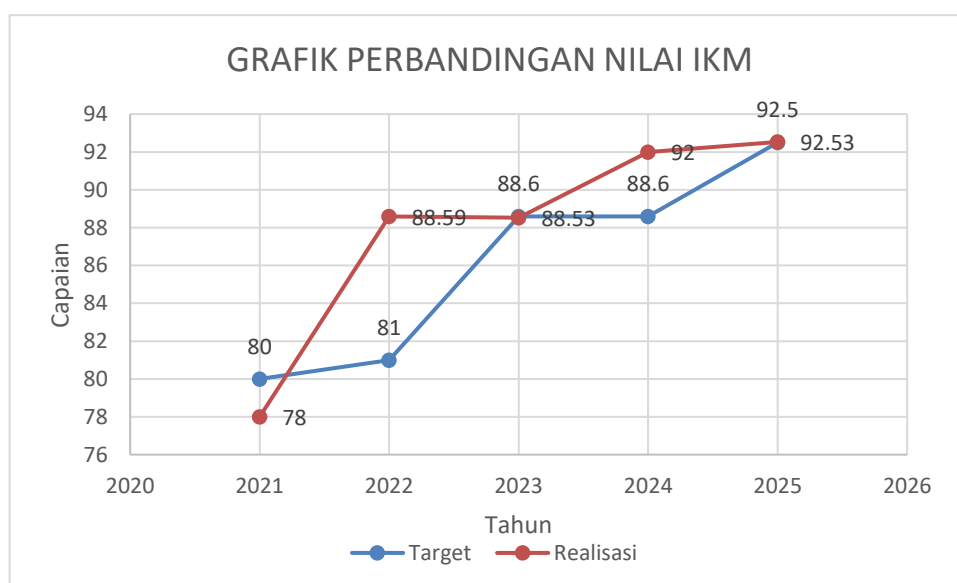
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegagalan	Keberhasilan	Alternatif Solusi Yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	- Kurangnya Sosialisasi layanan masyarakat tidak faham jenis layanan, prosedur dan kelengkapan administrasi	- Pemanfaatan teknologi Informasi penerapan layanan online	- Penguatan kompetensi dan Sikap Petugas layanan
			- Survei IKM hanya Formalitas data tidak dianalisis serius, hasil survey tidak ditindaklanjuti sehingga masalah yang sama terulang	- Hasil survei dianalisis secara serius dan dijadikan dasar perbaikan layanan berkelanjutan	- Optimalisasi Survey IKM
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	- Komitmen Pimpinan dan SDM terbatas, Pengelola SAKIP belum memiliki kompetensi yang memadai	- Perekrutan, Pelatihan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Pelatihan Teknis SAKIP
			- Evaluasi Kinerja tidak dimanfaatkan	- Memperkuat tim sakip kecamatan jetis	- Melaksanakan monev secara berkala dan terdokumentasikan
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	- SOP tidak dijalankan secara konsisten	- Implementasi SOP yang konsisten	- Penyempurnaan dan Pemutakhiran standart pelayanan
			- Sarana dan prasarana tidak mendukung	- Dukungan sarana dan prasarana memadai	- Penyediaan fasilitas sesuai dengan standar pelayanan
	Terwujudnya Sinergitas	Persentase hasil	- Tidak ada rencana tindak	- Setiap tindak lanjut	- Memastikan anggaran, SD

	antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	koordinasi yang ditindaklanjuti	lanjut yang terstruktur hasil koordinasi tidak disertai rencana aksi,jadwal dan target penyelesaian	memiliki batas waktu penyelesaian sehingga proses dapat dipantau	M dan sarana pendukung tersedia
			- Lemahnya monitoring dan pengendalian, tidak ada pemantauan berkala terhadap progres tindak lanjut hasil koordinasi	- Monitoring dan Evaluasi Rutin	- Monitoring dan Evaluasi berkala

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Jetis, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai IKM Kecamatan Jetis yang mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai sebesar 92,53 nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Mojokerto dengan rincian, sebagai berikut :

Gambar III Grafik Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Jetis



Nilai IKM Kecamatan Jetis cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dari target diawal tahun perencanaan 2021 sebesar 80 tercapai nilai 78 atau 97,5 %, 2022 dengan target 81 tercapai sebesar 88,59 atau sebesar 109,37 % tahun 2023 target 88,6 tercapai 88,53 atau sebesar 99,9 % pada tahun 2024 tercapai 92 atau 103,84 % dari target 88,60 dan di tahun 2025 tercapai 100,03 % dari target 92,50 hanya tercapai 92,53 dapat disimpulkan akhir RPJMD telah tercapai dan terealisasi 110,15 % dari target Nilai IKM sebesar 84.

Tabel III.3 a Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kecamatan	Realisasi Kabupaten	Realisasi Propinsi
1	Menigkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,53	90,87	-
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	82,11	75,67	-
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %	-	-
4	Teruvujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Kecamatan Jetis tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.626.967.000,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 2.499.596.269,00 atau sebesar 95,15% dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	16.975.000,00	16.496.850,00	97.18

2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	416.147.850,00	405.580.283,00	97.46
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.193.844.150,00	2.077.519.136,00	94.69

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92.50	92.53	100,03%	Rp 2.626.967.000,00	Rp 2.499.596.269,00	95,15%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jetis	81,50	82,11	100,75%	Rp 2.193.844.150,00	Rp 2.077.519.136,00	94,69%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100,00%	Rp 16.975.000,00	Rp 16.496.850,00	97,18%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	Rp 416.147.850,00	Rp 405.580.283,00	97,46%
Rata-rata capaian					100,19%	Total capaian		95,15

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 95,15 %, efisiensi kinerja Kecamatan Jetis sebesar 4,85%.

BAB IV

PENUTUP

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

1. Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
2. Pada tahun–tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Jetis Tahun 2025 sebesar Rp.2.606.955.200,00 dapat terserap sebesar Rp 2.436.865.505,00 atau 93,48%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Jetis pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan– kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi/penghematan pada kegiatan–kegiatan yang dapat ditekan.
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan dan jumlah Pegawai di Kecamatan Jetis
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, dll.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Jetis di Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Nilai IKM dengan target Kinerja 92,50 tercapai 92,53 , Nilai Sakip dengan target kinerja 81,50 tercapai 82,11, Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar dengan target kinerja 100% tercapai 100% dan Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% dan tercapai 100%

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 202r menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

CAMAT JETIS



TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196810161990031007

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN JETIS
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Cahyo Harianto, S.Sos., MM.
Jabatan: Camat Jetis Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

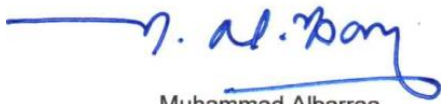
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Camat Jetis
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Tri Cahyo Harianto, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 196810161990031007

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN JETIS
KABUPATEN MOJOKERTO**

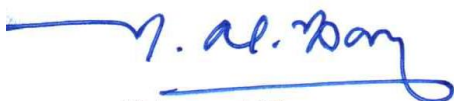
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	92,5

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	86,7 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.425.974.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 16.975.500	APBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 183.024.500	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Camat Jetis
Kabupaten Mojokerto


Tri Cahyo Harianto, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat II IVb
NIP 196810161990031007



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN JETIS
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Cahyo Harianto, S.Sos., MM.
Jabatan: Camat Jetis Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

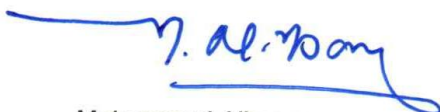
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Camat Jetis
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Tri Cahyo Harianto, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat II IVb
NIP 196810161990031007

Lampiran

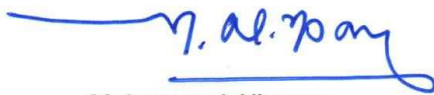
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN JETIS
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,50
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,50
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.193.843.650	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 16.975.500	PAPBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 416.147.850	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Camat Jetis
Kabupaten Mojokerto


Tri Cahyo Harianto, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 196810161990031007

PENGUKURAN KINERJA E-81

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1